

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM

Sejarah Bawaslu Buton Selatan

ada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Sejak dibentuknya kabupaten buton selatan melalui undang-undang nomor 16 tahun 2014 tentang pembentukan kabupaten buton selatan, tentunya segala hal yang berhubungan dengan kelembagaan daerah baru dibentuk, baik secara vertikal maupun horizontal dalam sistem pemerintahan daerah

Salah satu lembaga yang dibentuk adalah penyelenggara pemilu. Dibuton selatan sudah melalui dua kali pemilihan dan satu kali pemilu. Pemilihan pertamakali diadakan pada tahun 2017 yaitu pemilihan bupati

buton selatan yang kedua yaitu pemilihan gubernur sulawesi tenggara tahun 2018. Dan pemilihan umum serentak tahun 2019.

Panwaslu Sebagai lembaga adhock yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu dimulai dan dibubarkan sebelum calon yang terpilih dalam pemilu/pilkada dilantik dengan masa tugas 10 bulan, Pada pemilihan gubernur tahun 2018 kelembagaan pengawas pemilu di bentuk melalui undang undang No 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu Menghasilkan Komisioner 3 orang yaitu Rosni, S.IP., Mahyudin, S.Sos.,M.Si dan jumadi, S.Pd. (27 juni 2018). Pada pemilihan umum serentak tahun 2019, Kelembagaan Pengawas pemilu mengalami perubahan bukan lagi bersifat Adhock tetapi sudah menjadi permanen dengan nama Bawaslu (Badan pengawas Pemilu) dengan menghasilkan 3 orang komisioner yaitu Rosni S.IP, Mahyudin S.Sos M.Si dan Hastun S.Pd untuk tingkat Kabupaten dengan masa jabatan 5 tahun. Dalam Pembentukannya kelembagaan Bawaslu menggunakan Undang Undang No 7 Tahun 2017. Seiring dengan perubahan tersebut tentunya kewenangan kelembagaan bawaslu mengalami beberapa penguatan dari undang undang pemilu sebelumnya.

berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan

pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Bawaslu Kabupaten Buton Selatan berada di wilayah ibu kota kabupaten, yaitu kecamatan Batauga, beralamat di jalan Gaja Mada kelurahan Lakambau Kecamatan Batauga kode pos 93752.

Pembagian tugas dan fungsi dilaksanakan melalui rapat pleno Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan. Pleno Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 139 disebutkan pengambilan keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno, selanjutnya terdapat dalam pasal 140, dan pasal 141 serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 tentang Pleno.

Struktur Organisasi Bawaslu Buton Selatan tahun 2019

Dalam menentukan struktur organisasi bawaslu buton selatan dengan melaksanakan rapat pleno. adapun Berita Acara rapat Pleno Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai berikut:

Gambar 4.1

NO	NOMOR BERITA ACARA	PERIHAL
1	01/BAWASLU.PROV.SG/HK.00.01/VIII/2018	Pemilihan ketua, pembagian divisi, pembagian wilayah kerja bawaslu buton selatan

Hasil rapat pleno Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Buton Selatan tentang Pemilihan Ketua, Pembagian Divisi, dan Pembagian Wilayah Kerja Bawaslu Kabupaten Buton Selatan, sebagai berikut;

Gambar 4.2

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI	WILAYAH KERJA
1	Mahyudin, S.Sos,M.Si	Ketua	Koordiv hukum dan penanganan pelanggaran	Kec.Batauga Kec.kadatua
2	Rosni, S. IP	Anggota	Koodiv pengawasan dan hubungan antar lembaga	Kec.siompu Kec. Siompu barat
3	Hastun, S. Pd	Anggota	Koordiv SDM dan organisasi	Kec. sampolawa Kec. lapandewa Kec. batuatas

Visi-Misi Bawaslu Buton Selatan

Adapun visi-misi badan pengawas pemilu kabupaten buton selatan adalah sebagai berikut:

A. Visi

Menjadi Lembaga pengawas pemilu yang terpercaya

B. Misi

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasn partisipatif.
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana.
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi.
4. Memperkuat system teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel.
5. Mempercepat penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia pengawas serta aparatur secretariat diseluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang professional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

B. HASIL PENELITIAN

Pembangunan Komunitas Politik

Dalam organisasi selalu ada tujuan. Begitu pula dengan bawaslu kabupaten buton selatan, kesadaran tentang pengawas pemilu yang minim secara jumlah dan banyaknya tugas maka focus perhatian bawaslu adalah bagaimana melakukan perencanaan yang matang agar seluruh masyarakat bisa menjadi bagian dari pengawas pemilu. Hal ini di ungkapkan oleh ketua bawaslu buton selatan bapak Mahyudin S.Sos M.Si dalam wawancara sebagai berikut:

“ kesadaran kami untuk membangun komunitas pengawasan adalah bagaimana mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi pengawas pemilu mengingat jumlah pengawas pemilu yang sangat kecil, kami di bawaslu hanya berjumlah tiga komisioner, panwas kecamatan juga berjumlah tiga komisioner, panwas desa dan kelurahan masing-masing satu di tengah mengawasi tahapan pemilu yang padat ”

Dari wawancara tersebut alasan bawaslu buton selatan untuk membentuk pengawas pemilu partisipatif adalah terdapat kesenjangan yang signifikan antara jumlah anggota bawaslu di tengah tugas pengawasan pemilu yang banyak. Dalam hal ini bawaslu buton selatan untuk mencapai tujuan harus di tunjang oleh jumlah pengawas pemilu yang banyak pula. Dengan demikian maka bawaslu buton selatan membutuhkan pengawas partisipatif dari semua kalangan, baik itu masyarakat umum untuk menjadi aktif dalam pengawasan pemilu ataupun kelompok-kelompok atau komunitas yang bisa menjadi pengawas pemilu atau mengajak kelompok tersebut untuk terlibat aktif dalam mengawasi pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten buton selatan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara Bersama anggota bawaslu buton selatan ibu Rosni S.IP menyatakan dala sebuah wawancara sebagai berikut:

“ kami sangat menyadari bahwa masyarakat harus ikut terlibat dalam melakukan pengawasn pemilu dengan dasar tersebut kami melakukan rapat dan diskusi di kantor melakukan perencanaan untuk membentuk komunitas-komunitas pengawasan atau kelompok pengawasn dalam pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten buton selatan ”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bawaslu buton selatan melakukan rapat internal di kantor bawaslu buton selatan Bersama seluruh ketua dan anggota dan staf bawaslu buton selatan untuk menjadi membentuk komunitas-komuntas pengawas pemilu di bawaslu buton selatan

Selajutnya, berdasarkan hasil wawancara Bersama ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Buton Selatan tentang Public Relations (Humas) Politik bawaslu buton selatan dalam pemilu tahun 2019 adalah sebagai berikut. Hasil wawancara Bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Buton Selatan bapak MahyudinS.Sos. M.Si

“ Keberadaan PR Politik atau humas dalam bawaslu sangatlah penting., mengingat tugas bawaslu sebagai lembaga independen sebagai pengawas pemilu tahun 2019, semakin tingginya kompetisi para caleg ataupun pendukung caleg dalam pemilu. PR Politik juga di butuhkan untuk fungsi manajemen komunikasi sebagai alat antara bawaslu dan publik baik memberitahukan kepada para caleg maupun masyarakat buton selatan secara umum.Yang kami maksud dari PR Politik di bawaslu buton adalah melakukan rekrutmen, manajemen dan pengawasan baik itu di internal bawaslu maupun di luar kelembagaan bawaslu yang berhubungan erat dengan pemilu tahun 2019. langsung dengan tatap muka kepada publik ”.

Berdasarkan wawancara terhadap ketua bawaslu buton selatan sebagai informan 1 (satu) bahwa public relations politik bawaslu buton selatan adalah dengan fungsi manajemen dan pengawasan komunikasi baik terhadap peserta

pemilu, maupun terhadap masyarakat kabupaten buton selatan dalam hal ini adalah melakukan manajemen dan pengawasan untuk mencapai tujuan. Hal tersebut di atas adalah bawaslu buton selatan dalam melakukan pengawasan dengan perencanaan yang matang seperti hal tersebut berkesesuaian dengan apa yang di ungkapkan Dalam melaksanakan Public Relations Politik sebaiknya juga memperhatikan model perencanaan public relations politik, seperti halnya dunia perusahaan dapat mengacu ke model perencanaan Jefkins (1998 : 57-73). Ini berlaku di semua situasi, tetapi yang membedakan politik adalah jumlah publik laten serta sadar dan aktif bisa dibilang lebih besar dari pada di pengaturan perusahaan, padahal pada dasarnya setiap orang dapat didefinisikan sebagai pemangku kepentingan dalam politik. Berdasarkan hal tersebut di atas penulis menyimpulkan bahwa segala yang di lakukan oleh bawaslu buton selatan yaitu dengan melakukan perencanaan yang matang dalam melakukan tugas-tugas pengawasan. Bawaslu buton selatan memahami bahwa tugas untuk mengawasi jalannya kampanye tahun 2019 adalah dengan melakukan manajemen dan pengawasan. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut (Schermerhorn, 2002:12). Maka dengan demikian dalam melakukan perencanaan bawaslu buton selatan adalah untuk mencapai hasil kinerja yang telah di tetapkan dalam perencanaan dan tidak keluar dari perencanaan tersebut begitu pula dengan rencana bawaslu dalam merencanakan pembangunan komunitas pengawasan. Dalam hal ini pembangunan komunitas pengawasan

bawaslu buton selatan telah melakukan proses manajemen yang baik untuk mencapai tujuan kinerja yang maksimal dengan memahami situasi dan kondisi. Sedangkan Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa non public adalah masyarakat luas, masyarakat luas adalah Hal tersebut Hasil wawancara Bersama Ibu Rosni, S.IP,Koordinator divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga beliau menyatakan sebagaiberikut :

“ Di bawaslu buton selatan tentunya ada yang namanya PR atau hubungan masyarakat ini di buktikan ada koordinator divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga, yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dalam tugas-tugas pengawasan secara spesifik dan secara umum bawaslu adalah aktor PR Politik yg bertugas melakukan pengawasan jalannya kampanye pada pemilu. PR Politik adalah orang atau organisasi yang memiliki tugas dalam mengkomunikasikan peran yang ingin di sampaikan kepada publik agar merubah sikap untuk menghindari politik uang, dan politik sara dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat ”.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan 2 (dua) PR Politik bawaslu buton selatan adalah menyangkut tentang aktor PR yaitu tentang tugas pengawasan dan pengorganisasian agar berperan kepada public. Bawaslu buton selatan adalah lembaga yang mengedepankan pencegahan, pencegahan adalah tahapan awal dalam proses pengawasan dalam kampanye. Dalam agenda pencegahan ini hal yang paling penting di lakukan oleh bawaslu buton selatan adalah dengan melakukan sosialisasi. hal ini seperti yang di ungkapkan Grunig dan Hunt (1984) itu adalah model agen pers/publisitas, model informasi public, dan model dua arah taksimetris. Setiap model itu dibedakan berdasarkan tujuan yang ingin di capai. Meskipun humas mengembangkan fungsinya dengan melakukan komunikasi persuasif(pembujukan), tidak semua model digunakan harus digunakan melakukan persuasi. Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis memberikan kesimpulan bahwa yang di lakukan oleh bawaslu buton selatan adalah melakukan sosialisasi dengan kegunaan agar mampu mempengaruhi public dengan cara mengajak atau membujuk public.

Wawancara kepada Ibu Rosni, S.IP, beliau mengatakan sebagai berikut :

“ Kami bawaslu buton selatan menyadari benar bahwa tugas pengawasan pemilu di tahun 2019 dengan hanya beberapa personil maka akan lebih sulit maka dari itu kami membentuk komunitas-komunitas pengawasan misalnya kami membentuk desa pengawasan partisipatif di desa lawela, kecamatan bataug, Kegiatan yang kami lakukan adalah bagaimana membangun komunitas pengawasan misalnya kami sosialisasi Bersama mahasiswa, ibu-ibu BKMT adalah bagaimana komunitas ini harus menjadi bagian dari pengawasan dengan menjadikan komunitas tersebut sebagai pengawasan partisipatif ”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut informan 2 (dua) menyatakan bahwa kesadaran sumber daya manusia yang minim maka yang di lakukan bawaslu dalam kaitannya terhadap pendekatan public relations politik adalah pendekatan pembangunan komunitas.

Seperti halnya telah di jelaskan bahwa bawaslu buton selatan telah melakukan manajemen dan pengawasan maka situasi dan kondisi mengharuskan bawaslu buton selatan untuk membangun komunitas pengawasan untuk menudukung kinerja mengawasi jalannya kampanye pemilu tahun 2019. Berdasarkan kesadaran situasi bahwa bahwa personil bawaslu sangatlah minim maka yang di lakukan oleh bawaslu adalah dengan membangun komunitas pengawasan partisipatif yang tentunya di bawah binaan bawaslu buton selatan.

Hal yang sama pula di sampaikan oleh bapak Mahyudin, S.Sos. M.Si ketua Bawaslu kabupatenten buton selatan dalam sebuah wawancara dalam hal pembentukan komunitas pengawas pemilu tahun 2019. Adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut:

“ bawaslu buton selatan dalam pemilu tahun 2019 telah membentuk komunitas pengawasan berupa desa binaan pengawasan partisipatif di desa lawela, kecamatan batauga, kabupaten buton selatan dengan program yaitu desa belajar ilmu, desa anti politik uang, desa anti hoax, desa anti politik sara”

Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari informan 1 (satu) bahwa pendekatan yang di gunakan oleh bawaslu buton selatan dalam kaitannya terhadap public relations politik bawaslu adalah pembangunan komunitas dengan tujuan untuk media pembelajaran, menjadi bagian pengawasan yang langsung di bina oleh bawaslu buton selatan. Selain itu juga, berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas adalah bawaslu buton selatan untuk mengajak untuk mencapai kinerja bawaslu kabupaten buton selatan untuk mengawasi pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten buton selatan. Dalam mewujudkan rencana program yang usahakan oleh bawaslu buton selatan adalah memberikan motifasi, sikap dan tindakan. Motivasi yang di lakukan oleh bawaslu buton selatan adalah dengan melakukan transfer ilmu.

Hasil wawancara Bersama bapak Hastun S.Pd. beliau mengatakan sebagaiberikut :

“ Desa Lawela adalah desa yang tepat untuk di jadikan desa binaan pengawasan partisipatif sekaligus desa percontohan bagidesa-desa lain di kecamatanbatauga. Mendorong kerajinan local dalam membangun kesadaran pengawasan dan saling bekerja sama yang baik dalam mewujudkan desa binaan pengawasan partisipatif yang sukses”

Sedangkan menurut informan 3 (tiga) pendekatan yang di lakukan bawaslu buton selatan dalam hal pendekatan public relations politik adalah pendekatan pembangunan komunitas dengan fungsi membangun Kerjasama Bersama

bawaslu buton selatan dan menjadi percontohan desa pengawasan partisipatif. Yang dilakukan oleh bawaslu buton selatan adalah untuk membina masyarakat desa lawela kabupaten buton selatan dalam melakukan pengawasan. Dengan demikian bawaslu buton selatan akan melakukan pembinaan dengan melakukan transfer ilmu pengawasn partisipatif. Dalam pemibinaan tersebut ide dan gagasan bawaslu telah di salurkan hal tersebut di ungkapkan (Bella, Madsen, Sullivan, Swindler, & Tipton, 1985). komunitas adalah bahwa di dalam komunitas, ide dan nilai tertentu dibagikan. Komunitas adalah “sekelompok orang yang secara sosial saling bergantung, yang berpartisipasi bersama dalam diskusi dan pengambilan keputusan, dan yang berbagi praktik tertentu yang mendefinisikan komunitas dan dipelihara olehnya. Berdasarkan hasil wawancara tersebut pembentukan komunitas pengawasan adalah adanya proses komunikasi dimana ide dsan gagasan di bagikan dan komunitas pengawasan dan bawaslu memiliki ketergantungan dan rasa memiliki dalam rangka melakukan pengawasn kampanye pemilu tahun 2019 di kabupaten buton selatan. Dalam melakukan pengawasan bawaslu buton selatan selain juga memberikan transfer ilmu juga transfer etika sehingga ketertrikn masyarakat desa lawela kecamatan batauga menjadi semangat dalam merasa memiliki komunitas pengawasan sehingga komunitas tersebut akan memberikan iklim yang baik terhadap organisasi pengawasan. Dengan memberikan iklim yang baik terhadap komunitas berupa transfer etika tersebut maka akan membentuk keharmonisan dalam melakukan melakukan tugas untuk mencapai tujuan komunitas tersbut.

Gambar 4.3



Dari hasil wawancara dan gambar tersebut di atas bawaslu buton selatan dalam pemilihan umum tahun 2019 telah membentuk komunitas pengawasan partisipatif di desa lawela, kecamatan batauga. bawaslu buton selatan telah melakukan manajemen untuk membentuk komunitas pengawasan partisipatif berupa perencanaan Pembentukan komunitas pengawasan juga telah membentuk komunitas pengawasan adalah untuk menunjang kinerja berupa transfer ide dan gagasan agar saling memiliki tanggung jawab kinerja bawaslu kabupaten buton selatan dalam melakukan pengawasan kampanye pemilu tahun 2019 di kabupaten buton selatan. Yang sangat menarik dalam membentuk desa binaan bawaslu buton selatan adalah memilih desa lawela kecamatan batauga sebagai desa pengawasan partisipatif dimana desa tersebut adalah pintu gerbang masuknya kabupaten buton selatan dari kota baubau, desa lawela adalah desa pertama kali kita temui dari kota baubau. Hal tersebut secara geografi sangat baik dan menunjang pengawasan pemilu sebab jarak tempuh antara kota baubau dan kabupaten buton selatan sangat rentan pengaruh pelannggaran pemilu.

pembentukan komunitas pengawasan desa lawela kecamatan batauga kabupaten buton selatan adalah sebagai bentuk komitmen kerja bawaslu buton selatan agar desa lawela menjadi desa yang sadar akan pemilihan umum tanpa pelanggaran serta kesadaran masyarakat untuk menjadi bagian dari pengawas pemilu maka dengan demikian pembentukan komunitas pengawasan adalah menjembatani hubungan bawaslu dalam menumbuhkan kesepahaman dan dukungan atas segala program pengawasan dan tujuan bawaslu buton selatan.

Relasi Politik dan Publik

konsep pendekatan *politic relation with public* memiliki kata kunci *key audience*, pendekatan ini berpendapat bahwa terdapat tokoh-tokoh kunci yang mampu mempengaruhi suara publik.

Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan kepada ketua dan anggota bawaslu buton selatan di temukan data sebagai berikut :

Hasil Wawancara terhadap anggota Bawaslu Buton Selatan Bapak HastunS.Pd.beliau menyatakan sebagai berikut :

“ Strategi bawaslu buton selatan dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye secara garis besar adalah penguatan SDM bawaslu buton selatan berupa raker ataupun rakor di internal bawaslu. Sedangkan di luar organisasi bawaslu yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat contoh misalnya sosialisasi di pemilih pemula, kemudian di kalangan pengawasan partisipatif, anti politik uang, anti politik sara dan hoax dan beberapa kami rapat bersama beserta stake holder, misalnya partai politik, pemerintah daerah, KPU,kepolisian, kejaksaan. dalam momentum pemilihan umum tahun 2019 di buton selatan, bawaslu harus mampu melakukan hubungan baik pada semua public. Baik relasi public internal maupun relasi public eksternal agar tujuan Bersama dapat kita capai, dalam hal public internal bawaslu buton selatan selalu melakukan rakor Bersama staf dan anggota panwascam guna membangun sumber daya manusia untuk kebaikan internal dalam melakukan pengawasan dan

beberapa kali juga kami mengundang KPU, Kejaksaan, Pemerintah Daerah baik itu sekedar diskusi formal misalnya kami undang mereka membawakan materi maupun diskusi yang bersifat biasa agar hubungan antar lembaga semakin baik”.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan 3 (tiga) di temukan sebuah data bahwa tokoh kunci dalam public internal adalah pengawas pemilu kecamatan yang menjadi ujung tombak Bawaslu Buton Selatan dalam melakukan pengawasan pemilu tahun 2019 di kabupaten Buton Selatan. Untuk mencapai tujuan Bersama dalam mensukseskan pengawasan pemilu di butuhkan hubungan yang baik antara atasan dan bawahan maupun antara anggota seluruh pengawas pemilu dari tingkat kabupaten sampai tingkat kecamatan. Dalam melakukan hubungan komunikasi internal ini berguna untuk merekatkan hubungan yang baik di internal pengawas pemilu dengan cara pertemuan atau rapat. Rapat adalah agenda yang selalu menjadi menjadi tumpuan Bawaslu Bersama panwas kecamatan untuk menjadi satu keluarga besar pengawas pemilu untuk melakukan pengawasan pemilu yang penuh semangat dan berkualitas agar menciptakan pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten Buton Selatan menjadi bermartabat. Pendekatan tersebut adalah bagian dari usaha Bawaslu dalam melakukan pendekatan public relations politik Bawaslu di internal Bawaslu Buton Selatan. Pendekatan public relations politik Bawaslu Buton Selatan adalah hubungan politik dengan public dimana Bawaslu melakukan rapat baik itu internal Bawaslu. Dalam rapat tentunya adalah penguatan kelembagaan dengan melakukan koordinasi, dalam rapat tersebut adalah merekatkan hubungan antar individu dan individu lainnya. Hal Hubungan dengan public internal (internal public) atau hubungan

internal(internal relations), merupakan hubungan yang tercipta dalam organisasi melalui komunikasi antar individu yang merupakan pemangku kepentingan (stakeholder). Arifin (2012 :47-48). Hubungan bawaslu dalam public internal adalah hubungan antara atasan dan bawahan misalnya rapat koordinasi bawaslu dan panwascam. Hal tersebut dilakukan agar membangun hubungan yang terikat. Selain itu juga, hal tersebut dilakukan agar hubungan antara atasan dan bawahan semakin erat agar tujuan dalam melakukan pengawasan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Hubungan dapat terbentuk antara manusia yang bersifat manusiawi yang di kenal dengan human relations, hubungan juga dapat terbentuk antara organisasi dengan individu, antara organisasi dengan organisasi lain, atau organisasi dengan public atau masyarakat (Arifin , 2020). Public di artikan sebagai individu-individu yang di ikat oleh kepentingan dan minat yang sama terhadap suatu masalah berdasarkan hal tersebut bahwa hubungan public bawaslu buton selatan untuk membangun public relations di internal adalah dengan rapat dimana dalam rapat tersebut semua didiskusikan karena terikat pada tugas yang sama maka hubungan antar atasan dan bawahan adalah hubungan yang terikat oleh pekerjaan yaitu dengan melakukan rapat koordinasi dan rapat kerja dengan tujuan membangun hubungan yang baik serta membangun sumber daya manusia dalam rangka melakukan tugas-tugas pengawasan. Selain itu juga, hubungan internal bawaslu adalah hubungan institusional dimana hubungan yang terjadi selain hubungan antara atasan dan bawahan juga adalah hubungan antara badan pengawas pemilu tingkat

kabupaten dan panitia pengawas pemilu kecamatan. Sehingga yang menjadi fokus intitusional tersebut adalah adanya anggota, staf yang di sebut personalia juga dalam hubungan institusi memiliki struktur, perencanaan, program, penghasilan dalam halini adalah gaji dan fasilitas pendukung yang menjadi penghubunga hubungan tersebut.

Gambar 4.4



Hasil Wawancara terhadap Ketua Bawaslu Buton Selatan, Bapak Mahyuddin S.SosM.Si beliau menyatakan sebagai berikut :

“ Setiap organisasi memiliki tujuan begitu pula dengan bawaslu buton selatan. Strategi bawaslu adalah penguatan SDM berupa rapat dalam bawaslu dan penguatan hubungan bersama stake holder serta memperbanyak sosialisasi pengawasan dan melakukan penindakan bagi orang atau peserta pemilu yang melakukan pelanggaran pemilu ”.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan 1 (satu) di temukan data bahwa public relations politik bawaslu buton selatan dengan pendekatan hubungan terhadap public.

Dalam melakukan hubungan masyarakat dalam tahapan kampanye tahun 2019 bawaslu buton selatan mengedepankan hubungan persuasive dengan stake holder dengan melakukan ajakan berupa rapat bersama. Dalam sosialisasi bawaslu membutuhkan persiapan argumentasi yang baik agar mampu mempengaruhi audiens. Misalnya bawaslu buton selatan mengajak seluruh stakeholder untuk netral dalam pemilihan umum tahun 2019 sebagai bentuk hubungan bawaslu terhadap public eksternal dan juga melakukan rapat koordinasi bersama partai politik. Di mana hubungan tersebut adalah membangun hubungan Bersama stakeholder

Gambar 4.5



Dari gambar tersebut bahwa hubungan bawaslu juga melakukan hubungan bersama stake holder dengan melakukan rapat koordinasi. Dalam gambar tersebut juga ada peserta pemilu dalam hal ini yang di maksud oleh peserta pemilu adalah partai politik. Adapun tujuannya adalah untuk memaksimalkan hubungan antar lembaga untuk menghadapi tahapan kampanye

Hasil wawancara Bersama anggota Bawaslu buton selatan Ibu Rosni S.IP. beliau menyatakan sebagaiberikut :

“ Untuk mencapai tujuan pengawasan maka bawaslu buton selatan melakukan rekrutmen anggota misalnya panwas kecamatan hingga pengawas TPS, jika bawaslu rapat bersama pemda maka anggota di tingkat bawaaah juga melakukan hal yang sama misalnya bertemu kepala desa, tokoh ada di desa, BPD agar maksud dan tujuan pengawasan itu tercapai ”.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan 2 (dua) tersebut di atas, pendekatan public relations politik bawaslu adalah dengan hubungan public. Baik itu public internal maupun public eksternal. Public eksternal bawaslu adalah public yang berada dalam struktur bawaslu buton selatan namun berhubungan erat dalam aktifitas. Hasi wawancara Bersama ibu Rosni S.IP menyatakan sebagai berikut:

“Kami sangat berhubungan baik dengan berbagai pihak misalnya KPU, PEMDA, kepolisian untuk menciptakan pemilu yang berintegritas berupa kadang kami yang mengundang untuk rapat Bersama untuk berdialog dan silaturahmi di kantor bawaslu”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas bawaslu buton selatan menyadi bahwa untuk mencapai tujuan maka yang harus di bangun adalah pendekatan hubungan antar Lembaga atau stakeholder. Hubumngan tersebut atas dasar merekatkan hubungan tersebut. Dalam hal ini bawaslu buton selatan telah

melakukan hubungan public eksternal. Dalam hubungan eksternal bawaslu buton selatan beberapa kali melakukan rapat Bersama dengan public eksternal. Selain itu juga, bawaslu buton selatan memahami bahwa tokoh kunci dalam melakukan tujuan besar di luar awaslu adalah partai politik, pemda, kpu dan semua unsur yang saling terkait. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh anggota bawaslu buton selatan bapak Hastun S.Pd dalam wawancara sebagai berikut;

“ dalam melakun tugas pengawasan pemilu hal kami lakukan adalah melakukan hubungan terkait beruapa tokoh kunci dalam pemilihan umum seperti KPU, PEMDA, kepolisian, kejaksaan dan lain sebagainya yang terkait dengan pemilu tahun 2019 di kabupaten buton selatan”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa bawaslu buton selatan adalah Lembaga pengawas pemilu yang menjaga hubungan dengan Lembaga lainnya. Pemilihan umum adalah momentum memilih calon pemimpin di butuhkan kebersamaan dalam mewujudkan hal tersebut. Selain itu juga, bawaslu buton selatan memahami bahwa untuk mencapai tujuan adalah dengan menjaga dan membangun hubungan dengan baik Bersama tokoh kunci tersebut. Langkah awal untuk merekatkan hubungan adalah dengan melakukan rapat dengan cara dialogis. Dalam rapat maka semua pembahasan akan baik. Sebagaimana hasil wawancara Bersama ketua bawaslu buton selatan bapak Mahyudin S.Sos M.Si sebagai berikut:

“Alhamdulillah pertemuan atau rapat kami Bersama stake holder misalnya partai politik berjalan dengan baik di pemilu tahun 2019 kemarin salah satu hasil komunikasi yang di bangun adalah partai politik mengirimkan saksi partai politik dan saksi calon untuk kami latih sebagai saksi jadi beban tersebut tidak lagi partai poltik yang memikirkan untuk melatih saksi mereka”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut adalah dalam melakukan hubungan public eksternal bawaslu buton selatan sudah di lakukan. Bawaslu buton selatan dalam melakukan hubungan public internal adalah dengan mengundang rapat Bersama, membahas tujuan utama untuk mensukseskan pemilihan umum yang berintegritas di kabupaten buton selatan. Dalam hal ini bawaslu buton

selatan sangat memahami bahwa tokoh kunci pemilu adalah partai politik. Maka dengan pendekatan dialogis terdapat hasil komunikasi yang baik dimana bawaslu buton selatan melatih saksi partai politik maupun saksi calon legislative. Hal tersebut menandakan bahwa dalam membangun hubungan public eksternal bawaslu buton selatan sangat sangat mengedepankan hubungan yang harmonis. Membangun hubungan public eksternal adalah untuk mencapai tujuan yaitu agar terciptanya pemilihan umum yang berintegritas. Selain itu, hubungan public eksternal bawaslu sudah sangat baik di karenakan mampu mempengaruhi partai politik untuk melakukan Kerjasama yang baik dalam tahapan kampanye pemilu. Salah satu contohnya adalah partai politik menyerahkan bawaslu buton selatan untuk melakukan pembinaan dan pelatihan saksi partai politik. Hal tersebut menandakan bahwa bawaslu buton selatan telah mampu mempengaruhi partai politik dalam berkomunikasi dalam rapat Bersama. Dalam rapat terdapat komunikasi berupa interaksi maka yang menjadi pokok perhatian adalah adanya adu argumentasi dalam rapat tersebut untuk saling mempengaruhi. Maka Ketika terdapat kesepakatan Bersama bawaslu buton selatan telah mampu membangun hubungan public eksternal.

Hasil wawancara Bersama ibu Rosni S.IP mengatakan sebagai berikut:

“ dalam rapat Bersama partai politik suasana sangat cair ada masukan dan ada pembahasan pemilu namun juga terkadang di sela-sela pembahasan kami sangat santai bahkan tertawa agar suasana semakin bersahabat ”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas bahwa bawaslu buton selatan dalam membangun hubungan eksternal dalam hal ini adalah partai politik sangat menjaga arah komunikasi dengan persiapan retorika yang matang

sehingga dapat mempengaruhi audiens yaitu partai politik. Hal yang kontras yang kita lihat dimanapun bahwa Ketika partai politik maka pembahasan sangat berat dan terlihat kaku. Namun, bawaslu buton selatan telah membuat suasana cair dalam rapat tersebut. Bawaslu buton selatan telah mampu mempengaruhi peserta pemilu. Dalam rapat terdapat komunikasi. Komunikasi tersebut sangat banyak dan model maka bawaslu telah melakukan komunikasi interaksional sehingga nampak tidak formal dan memahami situasional yaitu memahami kondisi dan situasi yang ada. Selain itu, hal yang tampak menarik dalam hasil wawancara tersebut di atas adalah partai politik biasanya melatih sendiri segala hal yang berhubungan dengan di luar partai politik. Partai politik atau calon legislative biasanya adalah merekrut dan melatih sendiri saksi calon. Namun pada pemilu tahun 2019 di kabupaten buton selatan partai politik menyerahkan saksi untuk di latih oleh bawaslu buton selatan. Hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa bawaslu buton selatan telah mampu membangun public eksternal dengan mampu mempengaruhi partai politik untuk di latih oleh bawaslu buton selatan. Dengan demikian menurut penulis bawaslu buton selatan telah membangun hubungan politik dengan public. Baik itu public internal maupun public eksternal

4..2.3 Paradigma Politik Grunugian

Dalam pendekatan ini yang menjadi kata kunci adalah mutual understanding dan win-win solution, dalam pendekatan ini yang paling penting adalah mencari solusi dari masalah Bersama dengan melakukan pertemuan

Bersama stake holder yang ada di buton selatan. Seperti halnya di ungkapkan oleh ibu Rosni S,IP anggota Bawaslu buton selatan dalam wawancara:

“ dalam pengawasan pemilu yang paling penting adalah melakukan pencegahan dan pencegahan di mulai dengan melakukan komunikasi dengan beberapa pihak yang terkait misalnya KPU, PEMDA, KEPOLISIAN, PARPOL untuk Bersama menolak kampanye hitam, HOAX, SARA, Politik Uang dan pelanggaran lainnya ”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut ditemukan data bahwa dalam mencari solusi Bersama maka yang di lakukan bawaslu buton seltan adalah melakukan pertemuan rapat Bersama pihak terkait dalam momentum pemilihan umum tahun 2019. Pertemuan tersebut adalah dalam rangka mencari solusi Bersama dari kebanyakan persoalan pemilihan umum. Masalah yang sering terjadi dalam pemilu adalah kampanye hitam, berita hoax, isu sara, many politik. Begitupula di kabupaten buton selatan masalah pemilihan umum salah satunya adalah politik uang. Hasil wawancara Bersama ketua bawaslu buton selatan bapak Mahyudin S.Sos M.Si adalah sebagai berikut:

“ berkaca pada pilkada tahun 2017 masalah yang terjadi di kabupaten buton selatan adalah many politik maka yang kami lakukan pada pemilu tahun 2019 adalah melakukan pertemuan Bersama partai politik, kepolisian, pemda, kpu dan lain sebagainya yang terkait untuk menolak segala bentuk pelanggaran pemilu yang di dalamnya adalah menolak many politik pada pemilu tahun 2019 di buton selatan sebagai Langkah untuk melakukan pencegahan pada pengawasn kampanye pemilu tahun 2019 di kabupaten buton selatan ”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di ketemukan data bahwa langkah bawaslu dalam menukan win-win solusi adalah melakukan pertemuan berupa rapat. Rapat yang di lakukan bawaslu buton selatan adalah dengan menemukan solusi dari permasalahan pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilihan pada

tahun 2017 di kabupaten buton selatan adalah many politik. Berkaca pada kondisi tersebut maka bawalu buton selatan mencari solusi Bersama pihak terkait. Pihak terkait dalam hal ini adalah kpu, pemerintah daerah, kepolisian dan lain sebagainya untuk membicarakan solusi dari persoalan Bersama pada tiap momentum pemilihan ataupun pemilihan umum. Maka dengan melakukan pertemuan tersebut bawaslu buton selatan memberikan solusi berupa kegiatan Bersama tolak many politik, isu sara, black kampagne, berita hoax. Hasil wawancara Bersama hastun S.Pd anggota bawaslu buton selatan sebagai berikut:

“ Kegiatan yang kami lakukan Bersama kepolisian, pemda adalah dengan tolak kampanye hitam, anti berita hoax, stop isu sara dan tolak politik uang ”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut adalah bawaslu melakukan kegiatan tolak politik uang, anti berita hoax, tolak kampanye hitam bersama pihak terkait bersama kepolisian, pemerintah daerah dan lain sebagainya. Hal tersebut adalah bentuk awal dari sebuah pencegahan pelanggaran pemilu. Maka kegiatan tersebut adalah bagian dari wiwn-win solusi untuk mencegah pelanggaran pemilu agar keluar dari masalah Bersama. Oleh sebab tersebut maka sebagai Langkah untuk keluar dari masalah Bersama dalam pemilihan umum kegiatan tersebut di laksanakan. Selain itu juga, bawaslu dan publik memiliki jalan keluar atas masalah yang terjadi langkah bawaslu dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye pemilu tahun 2019 yang dapat terlihat dengan melakukan rekrutmen pengawas pemilu dan di sampaikan secara terbuka dalam bentuk pengumuman menjadi pengawas pemilu

Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan Bersama ketua dan anggota bawaslu buton selatan. Dapat di temukan beberapa data sebagai berikut misalnya,

Hasil wawancara terhadap Bapak Mahyudin S.Sos M.Si, beliau menyatakan sebagaiberikut :

“ Dalam pemilu tahun 2019 selain komisioner dan staf Undang-undangpun mengamanatkan untuk melakukan rekrutmen panitia pengawas kecamatan atau panwascam dan itulah yang juga membantu tugas-tugas pengawasan yang di biayai oleh negara kerana di atur dalam undang-undang ”.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan 1 (satu) bahwa bawaslu dapat di temukan data bahwa bawaslu buton selatan melakukan pendekatan public relations dengan paradigma grunugian. Dalam krisis pengawasan maka bawaslu melakukan perekrutan anggota baik itu staf dan pengawas pemilu kecamatan

Hasil wawancara terhadap anggota bawaslu buton selatan ibu Rosni S.IP. beliau menyatakan sebagai berikut :

“ Kami juga melakukan hubungan yang baik kepada peserta pemilu yakni partai politik,seperti yang kita tahu bahwa partai politik karena kita ketahui bersama bahwa merekalah yang bersaing dalam arena politik pemilu tahun 2019 dengan begitu kongkritnya adalah bawaslu, panwaslu mengadakan pelatihan saksi partai politik maupun saksi caleg agar hubungan terjalin dengan baik dengan menciptakan solusi seperti itu agar saksi juga paham tentang pemilu serta terapat keterhubungan antara bawaslu dan partai politik ataupun caleg sehingga tidak menjadi masalah di dalam pemilu”.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan 2 (dua) dapat di temukan data yaitu pendekatan yang di lakukan oleh bawaslu buton selatan adalah mencari win-win solusi dalam hal ini sesuai dengan pendekatan paradigm Grunugian.

Hasil wawancara terhadap bapak Hastun S.Pd., beliau menyatakan sebagai berikut :

“Langkah awal dalam melakukan pengawasan adalah bagaimana semua pihak tidak melanggar undang-undang pemilu yang merupakan acuan Bersama kita dalam kontestasi pemilihan umum. Olehnya itu, dalam hal melakukan pengawasan kami selalu dengan koordinasi dan sosialisasi dengan banyak berdialog pada semua pihak olehnya itu Target bawaslu buton selatan adalah bagaimana mensukseskan pemilihan umum tahun 2019 dengan pemilu yang bersih, aman dan jujur sesuai UU no. 7 tahun 2019 di kabupaten buton selatan dengan membuat kegiatan rapat koordinasi maupun rapat kerja teknis Bersama stakeholder agar dapat Bersama-sama mengawasi pemilu dan kegiatan tersebut di faslitasi penuh oleh bawaslu buton selatan baik teknis dan materi agar tercipta kemanfaatan bersama”.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan 3 (tiga) di temukanlah data hasil wawancara dengan membangun komunikasi bersama stakeholder agar mencapai tujuan bersama dalam pemilu tahun 2019 dengan membangun koordinasi dan rapat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas kata kunci paradigm grunugian adalah dengan mencari solusi bersama dalam sebuah masalah. Dalam pandangan ini tentunya adalah bagaimana saling menguntungkan misalnya dalam melakukan perekrutan panwascam terbuka dalam informasi. Hal ini bagi semua warga buton selatan memiliki hak yang sama untk mengikuti bagi yang memenuhi persyaratan. Dalam hal ini bawaslu buton selatan selalu mengedepankan asas keterbukaan. Konsep keterbukaan

merupakan bagian dari keadilan dimana kemudian bila di lakukan secara tertutup maka akan menjadi masalah dalam perekrutan panitia pengawas kecamatan. Maka untuk menciptakan rasa keadilan bawaslu buton selatan dalam melakukan rekrutmen anggota secara terbuka dan transparan. Kemudian, dalam hubungan bersama partai politik bawaslu selalu membangun komunikasi berupa rapat koordinasi bersama agar hubungan dalam agenda kampanye tidak terdapat pelanggaran. Tugas bawaslu adalah melakukan pengawasan dan penindakan dalam hal tersebut di atas yang di inginkan adalah bagaimana mengikuti undang-undang pemilu agar tidak terjadi pelanggaran. Bawaslu buton selatan jika menemukan pelanggaran maka akan terjadi kerugian di pihak lain misalnya akan di proses sesuai undang-undang pemilu. Selain itu, Rapat koordinasi adalah momentum semua stake holder untuk membangun hubungan dengan komunikasi antar individu yang kemudian terbangun kesepahaman bersama dalam kampanye pemilihan umum tahun 2019. Dala rapat koordinasi tentunya ada sebuah dialog. Yang di bangun dalam sebuah dialog adalah sebuah kejujuran agar tujuan masing-masing organisasi mencapai tujuannya. Misalnya, bawaslu buton selatan melakukan pelatihan saksi partai mapun caleg, tentunya dalam melakukan pelatihan saksi tersebut ada proses dialogis dalam memahami undang-undang pemilu dan mencari solusi berupa kesepahaman dalam konteks penafsiran. rujukan bersama tersebut berupa rujukan itu adalah undang-undang pemilu sehingga tidak menimbulkan masalah dalam proses kampanye pemilu. Paradigma Grunigian tidak selalu bergantung pada alat PR tertentu, tetapi berusaha menjadi strategis

di alam, mengatasi masalah besar yang dihadapi organisasi (Grunig & Grunig 1992). Inti dari pendekatan ini adalah kebutuhan untuk mengembangkan dialog. Awalnya sudut pandang ini menyarankan bahwa secara normatif setiap umpan balik harus simetris dua arah (Grunig dan Hunt 1984, Springston et al. 1992), meskipun ini kemudian diubah untuk mengakui bahwa ini mungkin tidak sesuai untuk semua organisasi dalam semua situasi (Grunig & Grunig 1992). Dalam ubungan tersebut di atas adalah hubungan dialogis, timbal balik dan dua arah. Melalui proses tersebut berarti saling melakukan komunikasi untuk saling mempengaruhi dan saling berhubungan. Dalam konsep interaksi maka yang di lakukan adalah komunikasi dua arah untuk menemukan titik temu. Maka dengan demikian menurut penulis bawaslu buton selatan telah melakukan pendekatan public relations dengan paradigma Grunugian.

Faktor Pendukung dan penghambat

Hasil wawancara bersama bawaslu buton selatan, ketua bawaslu buton selatan menyatakan sebagai berikut:

Hasil wawancara bersama bapak mahyudin S.Sos M.S.i

“ factor pendukungnya dalam melakukan hubungan public adalah dukungan dari pemangku kepentingan seperti halnya pemerintah daerah, kejaksanaan dan kepolisian sedang factor penghambat adalah anggaran ”

Hasil wawancara bersama ibu Rosni S.IP

“ Factor penghambat dalam melakukan hubungan internal adalah ada pada alat transportasi dimana kecamatan batuatas dalam melakukan koordinasi internal sangat sulit karena tidak adanya jaringan telekomunikasi selain itu juga adalah geografi yang cukup jauh melalui perjalanan laut di kecamatan batu atas ”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas maka dalam melakukan hubungan dengan public adalah anggaran dimana anggaran adalah menjadi salah satu kunci dalam sebuah aktifitas. Factor penghambat terdiri dari dua kata yaitu factor dan penghambat. Factor menurut KBBI adalah keadaan, hal atau peristiwa yang ikut mempengaruhi atau menyebabkan sesuatu. Adapun arti dari kata penghambat adalah sesuatu yang sifatnya menghambat. Maka dari hasil wawancara tersebut di atas factor yang mempengaruhi dari semua pendekatan adalah jarak dan saluran komunikasi sedangkan yang menghambat adalah anggaran. Karena bawaslu buton selatan adalah Lembaga independent yang dibentuk oleh undang-undang maka secara tidak langsung seluruh kegiatan bawaslu buton selatan adalah kegiatan fungsional sesuai dengan tugas dan pokok Lembaga tersebut. Selain itu juga, bawaslu adalah Lembaga negara maka seluruh kegiatan berasal dari anggaran, pendapatan dan belanja negara. Maka dengan anggaran yang cukup di tengah tugas bawaslu yang banyak maka kendala dalam melakukan pendekatan public relations adalah anggaran tersebut. Aktifitas akan menjadi terganggu dalam hal ini tugas bawaslu akan mengalami masalah ketika anggaran juga tidak memadai. Selanjutnya factor penghambat dalam melakukan Public Relations adalah alat telekomunikasi. Alat telekomunikasi adalah sarana untuk memberikan dan mengetahui informasi namun ketika alat telekomunikasi tidak ada maka akan menghambat aktifitas bawaslu dalam membangun hubungan dengan public. Telekomunikasi utamanya jaringan internet adalah saluran informasi. namun, daerah tugas bawaslu kabupaten buton selatan belum semua menjadi daerah

yang mudah untuk menjangkau informasi disebabkan ada beberapa titik daerah yang belum mempunyai jaringan telekomunikasi sehingga tugas-tugas bawaslu buton selatan menjadi terhambat. Salah satu tugas bawaslu buton selatan adalah menyampaikan informasi. Namun, dengan kondisi jaringan telekomunikasi yang belum merata di seluruh daerah buton selatan sehingga tugas-tugas bawaslu buton selatan juga menjadi terhambat. Factor penghambat selajutnya adalah letak geografi. Letak geografi bawaslu buton selatan terdiri dari daratan dan pulau dalam hal ini beberapa kecamatan yang ada di buton selatan harus di tempuh perjalanan melewati lautan. Kecamatan tersebut adalah kecamatan kadatua, kecamatan siompu, kecamatan siompu barat dan kecamatan batu atas. dimana kecamatan batu atas dalam membangun hubungan internal bawaslu membutuhkan perjalanan enam jam melalui jalur laut sehingga menghambat proses komunikasi. Bawaslu buton selatan dalam melakukan tugas-tugas pengawasan harus membutuhkan waktu yang banyak di tengah tugas bawaslu yang banyak pula dan merata di seluruh kabupaten buton selatan. Hal tersebut adalah yang menjadi factor penghambat bawaslu dalam melakukan public relations politik baik terhadap public internal maupun terhadap public eksternal.

C. PEMBAHASAN

Desa Binaan Bwaslu Buton Selatan

Bawaslu Buton Selatan telah membentuk Desa binaan sebagai bentuk untuk melakukan tugas fungsi organisasi dalam menghadapi pemilihan umum tahun 2019, hal ini adalah menjadikan bawaslu buton

selatan sebagai organisasi yang berfungsi pada publik. Kruckeberg menyarankan bahwa pendekatan komunitarian ini sekarang berkembang menjadi 'teori organik', yang menunjukkan bahwa tanggung jawab organisasi adalah untuk semua publik, bukan hanya publik yang aktif (Kruckeberg & Vujnovic 2007).

Akibatnya, pembangunan komunitas bisa menjadi sarana bagi demokrasi politik dalam ekonomi kapitalis untuk bertahan. desa tersebut adalah desa lawela kecamatan batauga kabupaten buton selatan sebagai desa untuk menjadi pengawas partisipatif yang di lakukan oleh bawaslu buton selatan. Pengawasan partisipatif adalah bentuk pendekatan bawaslu buton selatan dalam upaya mendekatkan masyarakat pada pelaksanaan tahapan pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten buton selatan, yang setiap tahapannya memiliki banyak potensi pelanggaran pemilihan umum, dengan demikian bawaslu buton selatan membentuk desa binaan pengawasan partisipatif sebagai langkah untuk mengurangi konflik aliran persuasif pluralis percaya bahwa Public Relations mewakili kepentingan dalam dunia yang kompetitif, pembangunan komunitas menunjukkan bahwa Public Relations dapat digunakan untuk mengurangi konflik (Kruckeberg & Starck 1998, Ledingham 2001, Cutlip et al. 2006). Manfaat bagi Public Relations adalah melalui proses dua langkah tidak langsung Dengan membantu menciptakan rasa komunitas, misalnya melalui CSR dan urusan komunitas, organisasi dalam jangka panjang akan mendapat manfaat dari komunitas yang lebih stabil.

Kesadaran bawaslu buton selatan dalam menghadapi tahapan kampanye pemilu tahun 2019 tentang deti dan jarak yang sangat dekat dengan masyarakat dengan membentuk desa binaan di desa lawela tersebut menjadikan masyarakat sebagai penentu pemilihan umum yang berintegritas dan bermartabat. Bawalsu buton selatan pada pemilihan umum tahun 2019 secara kelembagaan yang memiliki keterbatasan secara kuantitas sangat tidak mungkin menjangkau setiap orang atau peserta pemilu dalam melakukan kampanye maka di butuhkan masyarakat untuk melakukan pengawasn partisipaf di desa dalam rangka mensukseskan pemilu yang berintegritas dengan tanpa pelanggaran pemilu, keterbatasan personil bawaslu dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye tersebut di karenakan pengawas pemilu hanya menempatkan satu anggota pengawas pemilu dalam satu desa dan tiga personil di tingkat kecamatan.

Partisipasi masyarakat pada pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten buton selatan dalam hal ini adalah desa lawela kecamatan batauga menjadi sebuah keniscayaan, menjadikan bagian yang terinternaliasasi sebagai nilai-nilai pengawasn partisipatif mentehai potensi adanya dugaan pelanggaran, melakukan pencegahan, mengetahui apa yang harus di lakukan dan bagaimana dapat berpartisipasi untuk andil dalam memberikan laporan taua memberikan informasi awal pada bawaslu buton selatan dalam menegakan keadilan pemilu agar tidak tercederai oleh oknum atau pihak yang ingin memenangkan pertarungan dengan menghalalkan segala cara. Menurut Stromback dan Kiouisis (2011 : 34) mengatakan Public

Relations Politik adalah proses manajemen suatu organisasi atau aktor individu untuk tujuan politik melalui komunikasi dan aksi yang bertujuan untuk mempengaruhi, membangun dan memelihara hubungan dan reputasi yang menguntungkan publik utamanya serta mendukung misi dalam mencapai tujuannya.

Maka dengan di bentuknya desa binaan pengawasan partisipatif di desa lawela kecamatan batauga akan menjadi percontohan bagi masyarakat yang lain di kabupaten buton selatan seperti yang di ungkap oleh informan 3 dalam wawancara. Tentunya dalam pembentukan desa binaan oleh bawaslu buton selatan terdapat internalisasi pembelajaran bagaimana menjadi pengawas pemilu berupa pembelajaran ilmu pengawasan dan undang-undang pemilu. Internalisasi nilai-nilai pengawasan adalah membudayakan pengawasan oleh masyarakat oleh masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan kampanye pemilu. Seperti yang di ungkapkan oleh informan 1. Target bawaslu buton selatan adalah masyarakat mampu menyuarakan kebenaran dalam menegakan peraturan yang seharusnya di laksanakan, seperti yang di ungkapkan oleh informan 2.

Internalisasi nilai adalah tentang apa saja yang harus di tolak secara umum pada tahapan kampanye pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten buton selatan. Bawaslu buton selatan secara sadar dengan menciptakan desa binaan pengawasan pada desa lawela adalah bagian tugas untuk menciptakan masyarakat yang cerdas akan pentingnya sebuah pemilihan atau pemilu. Peran bawaslu buton selatan dalam membangun desa binaan

pengawasan partisipatif pada desa lawela adalah proses motivasi dalam mengembangkan komitmen untuk menciptakan keterlibatan masyarakat dalam upaya melakukan pengawasan pada tahapan kampanye pemilihan umum tahun 2019.

kolaborasi antara desa lawela dan bawaslu buton selatan tentunya akan melahirkan pengembangan alat perencanaan, motivasi, manajemen dan komitmen dalam upaya melakukan pengawasan pemilu. Pembangunan komunitas yang memerlukan beberapa defenisi dan klasifikasi. Tema yang berulang di seluruh beberapa definisi komunitas adalah bahwa di dalam komunitas, ide dan nilai tertentu dibagikan. Komunitas adalah “sekelompok orang yang secara sosial saling bergantung, yang berpartisipasi bersama dalam diskusi dan pengambilan keputusan, dan yang berbagi praktik tertentu yang mendefinisikan komunitas dan dipelihara olehnya” (Bella, Madsen, Sullivan, Swindler, & Tipton, 1985).

selain itu juga, desa pilihan bawaslu buton selatan dalam menjadikan desa lawela sebagai desa binaan bawaslu adalah dengan memperhatikan kondisi geografi dimana desa lawela adalah desa perbatasan dengan kota baubau, hal ini tidak bisa di pisahkan antara strategi pengawasan yang saling mempengaruhi antara kabupaten buton selatan dan kota baubau dalam segala aspke. dengan demikian pembangunan desa binaan bawaslu buton selatan pada desa lawela adalah bentuk komitmen bawaslu dalam rangka membangun komunitas pengawasan dalam hal melibatkan masyarakat ikut andil dalam melakukan pengawasan pemilu tahun 2019 di

kabupaten buton selatan. hal demikian di lakukan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam momentum pemilihan umum semakin baik kualitas demokrasi.

Rapat Koordinasi Bawaslu Buton Selatan

rapat koordinasi bawaslu buton selatan adalah bagaian yang di lakukan oleh bawaslu buton sebagai organiasi fungsional yang harus di bagun secara bersama stake holder. Rapat adalah pertemuan untuk mencapai tujuan bersama sedangkan koordinasi adalah usaha kelompok atau organisasi untuk mencapai tujun bersama dengan menciptakan kesatuan tindakan dalam mengejar tujaun bersama, bawaslu buton selatan telah melakukan rapat koordinasi dengan stake holder dalam hal ini adalah Pemerintah buton selatan, KPU, Kejaksaan, kepolisian dan partai politik dalam menghadapi pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten buton selatan. Rapat koordinasi bawaslu buton selatan adal proses pengaturan, memadukan, pengintegrasian kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Rapat koordinasi di lakukan sebagian besar di lakukan bersama publik eksternal bawaslu buton selatan. Hal ini di maksudkan untuk terciptanya komunikasi antar lembaga dalam suatu wilayah. Dalam hal ini tentunya yang menjadi kunci rapat koordinasi adalah terciptanya komunikasi yang yang adapa pada organisasi kunci Focus pada pendekatan ini pada proses identifikasi, pencarian dan pengaturan hubungan dengan orang-orang kunci (key audience) singkatnya pendekatan ini menurut Grunig dan Hunt (1984:4) memandang

Public Relations sebagaimana manajemen komunikasi antara organisasi dan publiknya.

Rapat koordinasi bawaslu adalah bentuk dari sebuah pendekatan kebersamaan dengan organisasi kunci yang ada di kabupaten buton selatan. Fungsi rapat koordinasi yaitu 1. Untuk memecahkan atau mencari jalan keluar suatu masalah. 2. Untuk menyampaikan informasi, perintah, pernyataan. 3. Sebagai forum silaturahmi dan demokrasi, diharapkan peserta rapat dapat ikut berpartisipasi kepada masalah-masalah yang sedang dikemukakan. 4. Sebagai alat koordinasi yang baik antara peserta rapat dengan perusahaan /organisasi. 5. Menampung semua permasalahan dari arus bawah (para peserta). 6. Sebagai sarana bernegosiasi 7. Ketentuan hukum.

menurut arahnya, terdapat koordinasi horizontal yaitu koordinasi antar pejabat atau antar yang mempunyai tingkat hierarki yang sama dalam suatu organisasi dan antar pejabat dari organisasi-organisasi yang setingkat, koordinasi diagonal koordinasi antar pejabat atau unit yang berbeda fungsi dan berbeda tingkatan hierarkinya dan koordinasi fungsional yaitu koordinasi antar pejabat, antar unit atau antar organisasi yang didasarkan atas kesamaan fungsi, atau karena koordinatornya mempunyai fungsi tertentu. Perkataan hubungan dapat di maknai sebagai keadaan berhubungan atau bersambung anantara satu pihak dengan pihak lainnya. Hubungan dapat juga berarti kontak, ikatan dan pertalian. Hubungan dapat terbentuk antara manusia yang bersifat manusiawi yang

di kenal dengan human relations, hubungan juga dapat terbentuk antara organisasi dengan individu, antara organisasi dengan organisasi lain, atau organisasi dengan public atau masyarakat (Arifin , 2020).

Bawaslu buton selatan dalam membangun rapat koordinasi dengan melibatkan fungsional itu di sebabkan bawaslu sebagai lembaga fungsional yang mengatur tentang pengawasan pemilihan umum atau peilihan dalam suatu wilayah dalam hal ini wilayah buton selatan. Kemudian adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerja sama mengenai kegiatan dan hasilnya pada suatu saat tertentu, termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing, didukung dengan adanya koordinator yang dapat memimpin dan menggerakkan serta memonitor kerjasama tersebut, serta memimpin pemecahan masalah bersama, dan adanya informasi dari berbagai pihak yang mengalir kepada koordinator sehingga koordinator dapat memonitor seluruh pelaksanaan kerjasama dan mengerti masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh semua pihak, serta dilengkapi dengan adanya saling hormat menghormati terhadap wewenang fungsional masing-masing pihak sehingga tercipta semangat untk saling bantu.

Rapat koordinasi adalah bentuk pendekatan komunikasi yang di lakukan oleh bawaslu buton selatan bersama dengan lembaga terkait. Hal ini di maksudkan untuk mengkomunikasikan tahapan kampanye pemilu yang di laksanakan pada tahun 2019 agar tercipta hubungan yang baik antar lembaga. Dalam hal ini bawaslu buton selatan telah melakukan rapat

koordinasi sebagai bagaian untuk membangun hubungan yang baik bersama publik eksternal. Hal ini di lakukan dalam rangka untuk menjaga hubungan, saling pengertian, manajamen dan mencari solusi ketika ada masalah dalam tahapan kampanye pemilu tahun 2019 di kabupaten buton selatan.

Rapat Kerja Teknis Bawaslu Buton Selatan

Bawaslu buton selatan pada pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten buton selatan telah dan sering melakukan rapat kerja teknis bersama staf dan anggota di bawahnya dalam hal ini adalah pengawas pemilu tingakt kecamatan. Hal ini di lakukan bawaslu adalah dengan melakukan hubungan kerja, hubungan ini di laukan sebagai bentuk pembinaan, manajemen dalam rangka melakukan persiapan kerja pengawasan pada pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten buton selatan.

Rapat kerja teknis di maksudkan untuk membangun hubungan motivasi kerja yang di lakukan oleh bawaslu terhadap staf dan anggota pengawas kecamatan. Hal ini agar menimbulkan semangat yang baik dalam hal melakukan kerja-kerja pengawasan. Rapat kerja teknis adalah rapat yang di lakukan oleh bawaslu dalam rangka penguatan hubungan internal. Penguatan hubungan internal berupa sumberdaya dan keterampilan dalam melakukan kerja-kerja pengawasan dengan dasar undang-undang. Public relations politik menurut Danadjaja (2011: 12) di kenal dengan istilah lebih populer dengan hubungan masyarakat disingkat humas adalah suatu bidang spesialisasi dalam ilmu komunikasi yang

menitik beratkan pada usaha menumbuhkan saling pengertian dan kerjasama antar public pada suatu instansi atau perusahaan. Selain itu Widjaja (2010 :3) juga menyatakan bahwa eksistensi humas pada setiap lembaga/instansi merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka memperkenalkan kegiatan dan aktivitas pada masyarakat (khalayak).

Berdasarkan hal tersebut tidak dapat menutup mata bahwa public relations politik yang berawal dari sebuah fungsi manajemen telah memberikan kontribusi sangat besar dalam konsepsi public relations dalam kehidupan manusia (Kasali, 2008: 31). hubungan bawaslu bersama staf dan anggota pengawas pemilu kecamatan adalah hubungan fungsional kerja dimana terdapat tujuan antara atasan dan bawahan. Bawaslu buton selatan telah membangun hubungan dengan public internal dimana rapat kerja teknis sebagai langkah komunikasi dialogis untuk melakukan kerja- kerja pengawasan dengan dasar teknis yaitu undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.